



BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
ALOKASI DANA NAGORI, DANA BAGI HASIL PAJAK
DAN BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH SETIAP NAGORI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan besaran Alokasi Dana Nagori, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah setiap Nagori;
- b. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Nagori, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah setiap Nagori di Kabupaten Simalungun kepada Nagori diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Nagori, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Setiap Nagori Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6946);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 2 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 39 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagori (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 676);
22. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pembentukan Huta (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 678);

23. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 681);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA NAGORI, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH SETIAP NAGORI TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Simalungun.
5. Kecamatan adalah wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Nagori adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dibantu Tungkat Nagori sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagori.
9. Pangulu adalah Kepala Pemerintahan Nagori.
10. Penjabat Pangulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Pangulu dalam kurun waktu tertentu.
11. Maujana Nagori adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagori berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Tungkat Nagori adalah unsur pembantu Pangulu yang terdiri dari sekretariat nagori (sekretaris nagori dan kepala urusan), pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Peraturan Nagori adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pangulu setelah dibahas dan disepakati bersama Maujana Nagori.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Nagori yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagori yang menampung seluruh penerimaan Nagori dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagori pada bank yang ditetapkan.

17. Alokasi Dana Nagori, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Simalungun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
19. Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPRD adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Nagori.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori, selanjutnya disebut APBNag adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagori.
21. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
22. Peserta adalah Pangulu dan Tungkat Nagori yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.
23. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
24. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah.
25. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

ADN, DBH dan BHPRD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Nagori dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagori, pelaksanaan pembangunan Nagori, pembinaan kemasyarakatan Nagori, pemberdayaan masyarakat Nagori dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagori.

BAB III SUMBER DAN BESARAN DANA

Pasal 3

ADN, DBH dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

- (1) Besaran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp. 149.171.447.700,- (seratus empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Besaran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp. 6.824.334.100,- (enam miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah).

- (3) Besaran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp. 10.971.574.266,- (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pembagian besaran ADN setiap Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
- a. menghitung dan mengalokasikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Nagori serta tunjangan Maujana Nagori berdasarkan jumlah aparatur Pemerintah Nagori; dan
 - b. mengalokasikan sisa atas pembagian ADN setelah dikurang penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Nagori serta tunjangan Maujana Nagori selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembagian besaran DBH setiap Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibagi secara merata kepada setiap Nagori.
- (3) Pembagian besaran BHPRD setiap Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibagi dengan ketentuan :
- a. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk pembangunan gedung kantor Pangulu sebanyak 25 (dua puluh lima) unit; dan
 - b. sebesar Rp. 5.971.574.266,- (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) yang dibagi secara merata kepada setiap Nagori.
- (4) Pengalokasian anggaran untuk pembangunan 25 (dua puluh lima) unit gedung kantor Pangulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Nagori serta tunjangan Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan berdasarkan surat keputusan pengangkatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menetapkan.
- (2) Penghasilan tetap Pemerintah Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pangulu dan Tingkat Nagori.
- (3) Tunjangan Pemerintah Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pangulu dan/atau penjabat Pangulu.
- (4) Maujana Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan tunjangan.
- (5) Penghasilan tetap Pemerintah Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan kepada Pangulu dan Tingkat Nagori yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (6) Selain penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Nagori serta tunjangan Maujana Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Nagori wajib mengalokasikan anggaran untuk operasional Pemerintah Nagori dan Maujana Nagori berdasarkan hasil musyawarah Nagori.
- (7) Operasional Maujana Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari :
 - a. biaya operasional untuk melaksanakan kegiatan musyawarah Nagori dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat, monitoring dan evaluasi; dan
 - b. biaya operasional untuk pelaksanaan tugas Maujana Nagori.
- (8) Komponen biaya operasional untuk pelaksanaan tugas Maujana Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b antara lain :
 - a. biaya alat tulis kantor;
 - b. biaya cetak dan penggandaan;
 - c. biaya makan minum rapat;
 - d. biaya perjalanan dinas;
 - e. biaya uang sidang pembahasan rancangan peraturan nagori; dan/atau
 - f. biaya seragam dinas.

- (9) Biaya operasional untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) agar dimusyawarahkan dan selanjutnya dianggarkan dalam RKPNag dan APBNag pada kegiatan penyediaan operasional Maujana Nagori.

Pasal 7

- (1) Besaran penghasilan tetap Pemerintah Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut :
- Pangulu diberikan penghasilan tetap sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - Sekretaris Nagori *non* Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan penghasilan tetap sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - Kepala Urusan dan Kepala Seksi diberikan penghasilan tetap sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - Gamot diberikan penghasilan tetap sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Besaran tunjangan Pangulu dan/atau pejabat Pangulu dan tunjangan Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagai berikut :
- Pangulu dan/atau pejabat Pangulu diberikan tunjangan sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - ketua Maujana Nagori diberikan tunjangan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - wakil ketua Maujana Nagori diberikan tunjangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - sekretaris Maujana Nagori diberikan tunjangan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - anggota Maujana Nagori diberikan tunjangan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 8

- (1) Penyaluran sisa atas pembagian ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, penyaluran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan penyaluran sisa atas pembagian BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, disalurkan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Pangulu menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati berupa :
 - a. Peraturan Nagori tentang APBNag Tahun Anggaran 2025;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sisa hasil penghitungan ADN, DBH dan BHPRD Tahun Anggaran 2024; dan
 - c. permohonan pencairan tahap I.
- (4) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Pangulu menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati berupa :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sisa hasil penghitungan ADN, DBH dan BHPRD tahap I; dan
 - b. permohonan pencairan tahap II.

Pasal 9

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Nagori serta tunjangan Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disalurkan dari RKUD ke RKN selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing aparatur Pemerintah Nagori dan Maujana Nagori.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Nagori serta tunjangan Maujana Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBNag Tahun Anggaran 2025.

- (3) Laporan pertanggungjawaban penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Nagori serta tunjangan Maujana Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBNag setiap tahunnya.

BAB V KEPESEERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pangulu dan Tungkat Nagori juga memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Simalungun.
- (2) Pangulu dan Tungkat Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan.
- (3) Peserta program jaminan kesehatan Pangulu dan Tungkat Nagori beserta anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dalam 1 (satu) keluarga.
- (4) Pendaftaran dan/atau perubahan sebagai peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal melakukan pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Bupati menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun sebagai penanggung jawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan.

- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan jaminan kesehatan Pangulu dan Tungkat Nagori berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Nagori;
 - b. memastikan seluruh Pemerintah Nagori telah menyampaikan data kepesertaan jaminan kesehatan;
 - c. mengalokasikan iuran pada APBD Kabupaten Simalungun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran bagi Pangulu dan Tungkat Nagori dengan pihak BPJS Kesehatan.
- (3) Pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara pengisian formulir melalui sistem informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (4) Pengisian formulir melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh salah 1 (satu) Tungkat Nagori yang ditunjuk oleh Pangulu.

Pasal 12

- (1) Besaran iuran kepesertaan bagi Pangulu dan Tungkat Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah sebesar 5% (lima persen) per bulan.
- (2) Iuran bagi Pangulu dan Tungkat Nagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan :
 - a. sebesar 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. sebesar 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (3) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Pangulu dan Tungkat Nagori sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.

- (4) Gaji atau upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi Pangulu berdasarkan penghasilan tetap dan tunjangan serta bagi Tungkat Nagori berdasarkan penghasilan tetap.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun melakukan pembayaran iuran 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran iuran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.
- (2) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan jaminan kesehatan bagi Pangulu dan Tungkat Nagori.
- (3) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyetoran iuran melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dari gaji atau upah per bulan untuk Pangulu dan Tungkat Nagori dan/atau 1% (satu persen) dari upah minimum kabupaten.
- (2) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap dan tunjangan Pangulu serta penghasilan tetap Tungkat Nagori.
- (3) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran kepesertaan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemotongan yang merupakan bagian penerimaan dari ADN hak masing-masing Pemerintah Nagori.

- (4) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh tempo pada hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan mengenai :

- a. pembagian besaran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pembagian besaran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan pembagian besaran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b;
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf a; dan
- c. permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI SIMALUNGUN,

ttd.

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 19 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN,



AKMAL HARIF SIREGAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025 NOMOR 691.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2025
TENTANG : ALOKASI DANA NAGORI, DANA BAGI
HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL
PAJAK/RETRIBUSI DAERAH SETIAP
NAGORI TAHUN ANGGARAN 2025

A. BESARAN ALOKASI DANA NAGORI, DANA BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH SETIAP NAGORI

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)				TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	7	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8	
1	SIANTAR	1 SILAMPUYANG	411.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	445.133.565	
		2 MARIHAT BARIS	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565	
		3 DOLOK MARLAWAN	448.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	481.733.565	
		4 RAMBUNG MERAH	426.033.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	459.183.565	
		5 SILAU MANIK	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565	
		6 SEJAHTERA	372.533.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	405.683.565	
		7 SIANTAR ESTATE	395.283.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	428.433.565	
		8 KARANG BANGUN	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565	
		9 NUSA HARAPAN	384.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	418.133.565	
		10 SITALASARI	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565	
		11 LESTARI INDAH	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565	
		12 LARAS DUA	411.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	445.133.565	

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)			TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8
		13 DOLOK HATARAN	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565
		14 PANTOAN MAJU	311.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	344.333.565
		15 PAMATANG SIMALUNGUN	585.933.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	819.083.565
		16 SILAU MALAHA	446.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	479.333.565
		17 PAMATANG SILAMPUYANG	374.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	407.933.565
2	GUNUNG MALELA	1 DOLOK MALELA	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565
		2 SENIO	350.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.333.565
		3 PAMATANG ASILOM	350.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.333.565
		4 SERAPUH	338.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	371.333.565
		5 MARGOMULYO	338.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	371.333.565
		6 SILULU	338.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	371.333.565
		7 SILAU MALELA	335.933.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	369.083.565
		8 BANDAR SIANTAR	372.533.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	405.683.565
		9 PAMATANG GAJING	374.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	407.933.565
		10 BANGUN	423.983.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	657.133.565
		11 NAGORI MALELA	360.533.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	393.683.565
		12 BUKIT MARAJA	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		13 PAMATANG SYAHKUDA	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		14 MARIHAT BUKIT	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565
		15 SAHKUDA BAYU	396.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	430.133.565

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)				TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8	
		16 LINGGA	387.383.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	420.533.565
3	GUNUNG MALIGAS	1 SILAU BAYU	338.183.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	371.333.565
		2 KARANG ANYAR	497.783.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	530.933.565
		3 KARANG REJO	495.733.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	528.883.565
		4 KARANG SARI	485.133.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	518.283.565
		5 TUMORANG	335.933.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	369.083.565
		6 RABUHIT	362.783.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	395.933.565
		7 HUTA DIPAR	362.783.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	395.933.565
		8 GAJING JAYA	362.783.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	395.933.565
		9 BANDAR MALELA	338.183.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	371.333.565
4	PANEI	1 JANGGIR LETO	411.983.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	0	215.470.400	645.133.565
		2 SEMPANG PANEI RAYA	323.783.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	356.933.565
		3 SIBORNA	350.783.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	383.933.565
		4 SIPOLDAS	350.783.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	383.933.565
		5 BANGUN RAKYAT	387.383.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	0	215.470.400	620.533.565
		6 SIGODANG	473.183.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	506.333.565
		7 SIGODANG BARAT	387.383.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	420.533.565
		8 BAH BOLON TONGAH	375.383.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	408.533.565
		9 MEKAR SARI RAYA	411.983.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	445.133.565
		10 SIMANTIN PANE DAME	384.983.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	418.133.565
		11 SEMPANG RAYA DASMA	362.783.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	395.933.565
		12 BANGUN DAS MARIAH	350.783.543	17.679.622	15.470.400		0	15.470.400	383.933.565

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)				TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8	
		13 BANGUN SITOLU BAH	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565	
		14 BAH LIRAN SIBORNA	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565	
		15 NAULI BARU	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565	
		16 RAWANG PARDOMUAN NAULI	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565	
5	PANOMBEIAN PANEI	1 PANOMBEIAN	409.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	442.733.565	
		2 PAMATANG PANOMBEIAN	436.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	469.733.565	
		3 NAGORI BOSAR	396.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	430.133.565	
		4 MARJANDI	397.133.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	430.283.565	
		5 SIMPANG PANEI	436.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	469.733.565	
		6 TALUN KONDOT	360.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	393.533.565	
		7 SIMBOLON TENGGOKH	436.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	469.733.565	
		8 PAMATANG PANEI	399.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	433.133.565	
		9 MARJANDI PISANG	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565	
		10 BANUH RAYA	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565	
		11 RUKUN MULYO	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565	
6	JORLANG HATARAN	1 KASINDIR	409.933.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	443.083.565	
		2 SIBUNGA BUNGA	335.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	368.933.565	
		3 JORLANG HATARAN	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565	
		4 BAH SAMPURAN	461.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	494.333.565	
		5 BAH BIRONG ULU	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565	

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)			TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8
		6 PINANG RATUS	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565
		7 DOLOK MARLAWAN	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565
		8 PANOMBEAN HUTAUURUNG	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		9 DIPAR HATARAN	338.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	371.333.565
		10 PAGAR PINANG	375.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	408.533.565
		11 DOLOK PARRIASAN	375.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	408.533.565
		12 PARMONANGAN	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
7	RAYA KAHEAN	1 SAMBOSAR RAYA	409.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	442.733.565
		2 PANDUMAN	461.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	494.333.565
		3 AMBAROKAN PANE RAYA	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565
		4 BAH TONANG	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565
		5 BAH BULIAN	375.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	408.533.565
		6 BANGUN RAYA	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		7 DURIAN BANGGAL	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565
		8 SORBA DOLOG	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565
		9 GUNUNG DATAS	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565
		10 PULI BUAH	374.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	407.933.565
		11 BANU RAYA	326.183.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	559.333.565
		12 MARUBUN SIBORAS	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		13 BANJARAN	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
8	BOSAR MALIGAS	1 PARBUTARAN	469.083.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	502.233.565

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)			TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8
		2 MAYANG	374.783.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	607.933.565
		3 BOLUK	394.933.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	428.083.565
		4 SEI MANGKEI	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565
		5 GUNUNG BAYU	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		6 TALUN SARAGIH	419.883.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	453.033.565
		7 DUSUN PENGKOLAN	491.633.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	524.783.565
		8 SEI TOROP	296.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	329.933.565
		9 MARIHAT TANJUNG	443.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	476.933.565
		10 MARIHAT BUTAR	396.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	430.133.565
		11 TELADAN	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565
		12 ADIL MAKMUR	444.483.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	477.633.565
		13 TEMPEL JAYA	497.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	530.933.565
		14 SIDOMULYO	321.733.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	354.883.565
		15 MEKAR REJO	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		16 NANGGAR BAYU	375.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	408.533.565
9	SIDAMANIK	1 BAH BUTONG I	411.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	445.133.565
		2 SIDAMANIK	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565
		3 AMBARISAN	335.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	368.933.565
		4 TIGA BOLON	473.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	506.333.565
		5 BAH BUTONG II	411.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	445.133.565
		6 BAHAL GAJAH	473.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	506.333.565
		7 MANIK HATARAN	348.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	381.533.565
		8 MEKAR SIDAMANIK	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		9 MANIK MARAJA	372.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	405.533.565

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)				TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8	
		10 BAH BIAK	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565	
		11 BIRONG ULU MANRIAH	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565	
		12 KEBUN SAYUR	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565	
		13 MANIK RAMBUNG	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565	
		14 BUKIT REJO	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565	
10	PAMATANG SIDAMANIK	1 SAIT BUTTU SARIBU	516.233.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	549.383.565	
		2 PAMATANG SIDAMANIK	399.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	433.133.565	
		3 SARIMATTIN	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565	
		4 BANDAR MANIK	348.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	381.533.565	
		5 JORLANG HULUAN	375.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	408.533.565	
		6 SIHAPORAS	375.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	408.533.565	
		7 PEMATANG TAMBUN RAYA	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565	
		8 SIMANTIN	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565	
		9 GORAK	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565	
11	TANAH JAWA	1 TANJUNG PASIR	394.883.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	428.033.565	
		2 TOTAP MAJAWA	396.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	430.133.565	
		3 BALIMBINGAN	513.983.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	747.133.565	
		4 BAJA DOLOK	318.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	351.533.565	
		5 BOSAR GALUGUR	469.083.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	502.233.565	
		6 BAH JAMBI II	448.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	481.733.565	

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)				TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8	
		7 BAH KISAT	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565	
		8 PANAMBEAN MARJANJI	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565	
		9 MUARA MULJA	448.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	481.733.565	
		10 PARDAMEAN ASIH	299.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	332.333.565	
		11 MEKAR MULJA	375.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	408.533.565	
		12 MALIGAS TONGAH	407.883.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	441.033.565	
		13 MARUBUN JAYA	538.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	571.933.565	
		14 PAGAR JAMBI	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565	
		15 BALLJU	375.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	408.533.565	
		16 BAYU BAGASAN	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565	
		17 BAH JAMBI III	323.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	356.933.565	
		18 PARBALOGAN	374.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	407.933.565	
		19 MARUBUN BAYU	323.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	356.933.565	
12	HATONDUHAN	1 BUTTU BAYU	448.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	481.733.565	
		2 BOSAR NAULI	421.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	454.733.565	
		3 TANGGA BATU	596.183.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	829.333.565	
		4 BUNTU TURUNAN	473.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	506.333.565	
		5 SARIBU ASIH	421.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	454.733.565	
		6 JAWA TONGAH	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565	
		7 TONDUHAN	350.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.333.565	
		8 PARHUNDALIAN JAWA DIPAR	370.283.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	403.433.565	
		9 JAWA TONGAH II	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565	

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)			TOTAL	
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8	
13	DOLOK PANRIBUAN	1	NEGERI DOLOK	411.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	445.133.565
		2	DOLOK PARMONANGAN	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565
		3	DOLOK TOMUAN	399.383.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	632.533.565
		4	MARIHAT DOLOK	387.383.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	620.533.565
		5	TIGA DOLOK	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		6	UJUNG BONDAR	461.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	494.333.565
		7	MARIHAT RAJA	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		8	BANDAR DOLOK	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565
		9	GUNUNG MARIAH	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		10	SIATASAN	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		11	MARIHAT MARSADA	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		12	PONDOK BULUH	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		13	MARIHAT PONDOK	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
14	PURBA	14	LUMBAN GORAT	350.783.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	583.933.565
		15	PALIANAOPAT	399.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	433.133.565
		1	PURBA TONGAH	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565
		2	PEMATANG PURBA	473.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	506.333.565
		3	URUNG PURBA	411.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	445.133.565
		4	PURBA SIPINGGAN	448.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	481.733.565
		5	HINALANG	444.483.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	477.633.565
		6	PURBA DOLOK	411.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	445.133.565
		7	TANO TINGGIR	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)				TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8	
		8 SARIBU JANDI	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565	
		9 HUTA RAJA	411.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	445.133.565	
		10 BANDAR SAUHUR	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565	
		11 BUNGA SAMPANG	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565	
		12 NAGORI TONGAH	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565	
		13 URUNG PANE	436.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	469.733.565	
15	HARANGGAOL HORISAN	1 NAGORI PURBA	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565	
		2 SIHALPE	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565	
		3 PURBA HORISAN	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565	
		4 PURBA PASIR	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565	
16	GIRSANG SIPANGAN BOLON	1 SIPANGAN BOLON	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565	
		2 SIBAGANDING	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565	
		3 SIPANGAN BOLON MEKAR	348.733.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	381.883.565	
17	DOLOK BATU NANGGAR	1 SILENDUK	374.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	407.933.565	
		2 BAH TOBU	448.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	481.733.565	
		3 BANDAR SELAMAT	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565	
		4 DOLOK ILIR I	374.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	407.933.565	
		5 DOLOK ILIR II	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565	
		6 BAHUNG KAHEAN	375.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	408.533.565	

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)			TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8
		7 DOLOK MAINU	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565
		8 DOLOK MERANGIR I	448.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	481.733.565
		9 DOLOK MERANGIR II	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		10 KAHEAN	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565
		11 DOLOK TENERA	350.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.333.565
		12 DOLOK KATARAN	448.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	481.733.565
		13 PADANG MAINU	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565
		14 BAHUNG HULUAN	375.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	408.533.565
18	HUTA BAYU RAJA	1 MARIAH HOMBANG	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565
		2 PULO BAYU	399.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	433.133.565
		3 SILAKKIDIR	448.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	481.733.565
		4 RAJA MALIGAS	448.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	481.733.565
		5 DOLOK SINUMBAH	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		6 MALIGAS BAYU	374.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	407.933.565
		7 JAWA BARU	360.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	393.533.565
		8 MANCUK	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565
		9 MARIHAT MAYANG	375.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	408.533.565
		10 BOSAR BAYU	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		11 RAJA MALIGAS I	446.333.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	479.483.565
		12 BAHAL BATU	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565
		13 POKAN BARU	436.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	469.733.565
		14 MANRAYAP BAYU	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		15 TALANG BAYU	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)			TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8
19	JAWA MARAJA BAH JAMBI	1 JAWA MARAJA	473.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	506.333.565
		2 MOHO	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565
		3 BAHALAT BAYU	411.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	445.133.565
		4 MEKAR BAHALAT	384.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	418.133.565
		5 TANJUNG MARAJA	448.583.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	681.733.565
		6 MARIAH JAMBI	470.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	503.933.565
		7 BAH JOGA	440.033.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	473.183.565
		8 BAH JAMBI	473.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	506.333.565
20	DOLOK PARDAMEAN	1 TIGARAS	399.383.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	632.533.565
		2 PARIK SABUNGAN	448.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	481.733.565
		3 SIBUNTUON	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565
		4 DOLOK SARIBU	375.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	408.533.565
		5 BUTTU BAYU PANE RAJA	375.383.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	608.533.565
		6 SILABAH JAYA	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		7 TOGU DOMU NAULI	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		8 SIRUBE-RUBE GUNUNG PURBA	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		9 TANJUNG SARIBU	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		10 SIHEMUN BARU	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		11 NAGORI BAYU	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
21	PEMATANG	1 PURWOSARI	323.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	356.933.565

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)				TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8	
	BANDAR								
		2	TALUN MADEAR	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		393.533.565
		3	MARIAH BANDAR	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		383.333.565
		4	KANDANGAN	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		432.533.565
		5	PARDOMUAN NAULI	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		530.933.565
		6	PURBA GANDA	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		380.933.565
		7	KERASAAN II	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		371.333.565
		8	BANDAR MANIS	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		430.133.565
		9	WONOREJO	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		506.333.565
		10	TALUN REJO	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		457.133.565
		11	PURWODADI	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		383.933.565
22	BANDAR HULUAN	1	NAGA JAYA I	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		580.133.565
		2	BAH GUNUNG	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		457.133.565
		3	BANDAR TONGAH	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		653.933.565
		4	DOLOK PARMONANGAN	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		465.633.565
		5	LARAS	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		359.333.565
		6	NAGA JAYA II	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		506.333.565
		7	TANJUNG HATARAN	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		481.733.565
		8	BANDAR BETSY I	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		432.533.565
		9	BANDAR BETSY II	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		438.633.565
		10	NAGA SOPPA	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		408.533.565
23	BANDAR	1	PEMATANG	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400		405.533.565

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)				TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8	
		KERASAAN							
		2 MARIHAT BANDAR	421.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	454.733.565	
		3 NAGORI BANDAR	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565	
		4 BANDAR RAKYAT	374.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	407.933.565	
		5 BANDAR PULO	374.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	407.933.565	
		6 BAH LIAS	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565	
		7 PERDAGANGAN II	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565	
		8 PERLANAAN	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565	
		9 SUGARANG BAYU	374.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	407.933.565	
		10 PEMATANG KERASAAN REJO	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565	
		11 TIMBAAN	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565	
		12 BANDAR JAWA	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565	
		13 SIDOTANI	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565	
		14 LANDBOUW	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565	
24	BANDAR MASILAM	1 BANDAR MASILAM	448.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	481.733.565	
		2 LIAS BARU	368.883.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	402.033.565	
		3 BANDAR SILOU	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565	
		4 PANOMBEAN BARU	375.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	408.533.565	
		5 GUNUNG SERAWAN	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565	
		6 BANDAR MASILAM II	444.483.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	477.633.565	
		7 PARTIMBALAN	469.083.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	502.233.565	
		8 BANDAR TINGGI	490.933.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	524.083.565	

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)			TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8
		9 BANDAR REJO	473.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	506.333.565
		10 BANDAR GUNUNG	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
25	SILIMAKUTA	1 SIBANGUN MARIAH	350.183.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	583.333.565
		2 PURBA SINOMBAH	299.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	332.333.565
		3 PURBA TUA	274.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	307.733.565
		4 PURBA TUA BARU	274.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	307.733.565
		5 SINAR BARU	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		6 PURBATUA ETEK	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
26	DOLOK SILAU	1 CINGKES	374.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	407.933.565
		2 PANRIBUAN	385.133.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	418.283.565
		3 SARAN PADANG	473.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	506.333.565
		4 MARIAH DOLOK	362.783.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	595.933.565
		5 MARUBUN LOKKUNG	411.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	445.133.565
		6 DOLOK MARIAH	375.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	408.533.565
		7 BAWANG	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		8 HUTA SAING	338.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	371.333.565
		9 TOGUR	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		10 PERASMIAN	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		11 TANJUNG PURBA	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		12 SILAU MARAWAN	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		13 BOSI SINOMBAH	350.783.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	583.933.565
		14 UJUNG BAWANG	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
27	SILOU KAHEAN	1 SIMANABUN	399.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	433.133.565

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)			TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8
		2	PARDOMUAN TONGAH	348.533.543	15.470.400	0	15.470.400	381.683.565
		3	NEGERI DOLOK	387.383.543	15.470.400	200.000.000	215.470.400	620.533.565
		4	BANDAR MARUHUR	387.383.543	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		5	SILOU DUNIA	387.383.543	15.470.400	200.000.000	215.470.400	620.533.565
		6	DOLOK MARAWA	399.983.543	15.470.400	0	15.470.400	433.133.565
		7	MARIAH BUTTU	436.583.543	15.470.400	200.000.000	215.470.400	669.733.565
		8	DOLOK SARIBU BANGUN	350.783.543	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		9	BANDAR NAGORI	350.783.543	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		10	SILOU PARIBUAN	360.383.543	15.470.400	0	15.470.400	393.533.565
		11	BUTTU BAYU	350.783.543	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		12	NAGORI TANI	411.983.543	15.470.400	0	15.470.400	445.133.565
		13	BAH SARIMAH	387.383.543	15.470.400	200.000.000	215.470.400	620.533.565
		14	DAMAKITANG	387.383.543	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		15	SINASIH	350.783.543	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		16	PARDOMUAN BANDAR	350.783.543	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
28	TAPIAN DOLOK	1	BATU SILANGIT	387.383.543	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		2	DOLOK MARAJA	470.933.543	15.470.400	0	15.470.400	504.083.565
		3	DOLOK ULU	399.383.543	15.470.400	200.000.000	215.470.400	632.533.565
		4	NAGUR USANG	497.783.543	15.470.400	0	15.470.400	530.933.565
		5	DOLOK KAHEAN	387.383.543	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		6	NAGA DOLOK	446.533.543	15.470.400	0	15.470.400	479.683.565
		7	PURBASARI	448.583.543	15.470.400	0	15.470.400	481.733.565

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)			TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8
		8 PEMATANG DOLOK KAHEAN	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565
		9 NEGERI BAYU' MUSLIMIN	405.833.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	438.983.565
		10 DOLOK SIMBOLON	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
29	RAYA	1 RAYA BAYU	372.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	405.533.565
		2 BAHAPAL RAYA	362.783.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	595.933.565
		3 SIPORKAS	436.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	469.733.565
		4 SIHUBU RAYA	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		5 RAYA BOSI	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		6 SILOU HULUAN	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		7 SILOU BUTTU	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		8 BONGGURON KARIAHAN	411.983.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	645.133.565
		9 SIMBOU BARU	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		10 DAME RAYA	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		11 LIMAG RAYA	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		12 LOKKUNG RAYA	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
30	UJUNG PADANG	1 HUTA PARIK	399.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	433.133.565
		2 DUSUN ULU	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565
		3 TINJOWAN	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565
		4 SAYUR MATINGGI	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565
		5 TARATAK NAGODANG	372.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	405.533.565

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)			TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8
		6 SORDANG BOLON	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565
		7 TELUK LAPIAN	372.733.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	405.883.565
		8 TANJUNG RAPUAN	423.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	457.133.565
		9 PAGAR BOSI	374.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	407.933.565
		10 BANGUN SORDANG	385.333.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	418.483.565
		11 AEK GERGER SIDODADI	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565
		12 PULO PITU MARIHAT	374.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	407.933.565
		13 SIRINGAN RINGAN	338.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	371.333.565
		14 RIAH NA POSO	374.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	407.933.565
		15 SEI MERBAU	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		16 KAMPUNG LALANG	362.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	395.933.565
		17 SORDANG BARU	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		18 BANJAR HULU	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		19 RAWA MASIN	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
31	PAMATANG SILIMAHUTA	1 UJUNG SARIBU	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		2 SILIMAKUTA BARAT	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		3 SIBORAS	335.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	368.933.565
		4 MARDINGDING	311.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	344.333.565
		5 NAGA SARIBU	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		6 SARIBU JANDI	311.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	344.333.565
		7 SINAR NAGA MARIAH	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		8 UJUNG MARIAH	338.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	371.333.565

NO	KECAMATAN	NAGORI	ALOKASI DANA NAGORI	DANA BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)			TOTAL
					BAGI HASIL PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU	TOTAL(BHPRD + ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PANGULU)	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=4+5+8
		9 BANDAR SARIBU	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		10 NAGA BOSAR	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
32	DOLOG MASAGAL	1 RAYA HULUAN	387.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	420.533.565
		2 DOLOG HULUAN	448.583.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	481.733.565
		3 BINTANG MARIAH	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		4 BAH BOLON	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		5 RAYA USANG	411.983.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	445.133.565
		6 BANGUN PANE	399.383.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	432.533.565
		7 PARJALANGAN	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		8 PARTUAHAN	350.783.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	383.933.565
		9 SINAMAN LABAH	326.183.543	17.679.622	15.470.400	0	15.470.400	359.333.565
		10 PAMATANG SINAMAN	350.783.543	17.679.622	15.470.400	200.000.000	215.470.400	583.933.565
		TOTAL	149.171.447.700	6.824.334.100	5.971.574.266	5.000.000.000	10.971.574.266	166.967.356.066

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN

SISA PENGHITUNGAN ADN, DBH DAN BHPRD

TAHUN ANGGARAN

Rekening										Uraian	Uraian Keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran		Realisasi	Sisa		% Capaian Keluaran	Tenaga Kerja Orang	Durasi Hari	Upah Rp.	Ket
1			2				Rp.	Rp.	Rp.					Rp.	(8)-(6-7)								
a	b	c	a	b	c	d																	
			(1)	4				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)-(6-7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
				4				PENDAPATAN															
				4	2			TRANSFER															
				4	2	1		ADN															
				4	2	2		DBH															
				4	2	3		BHPRD															
								JUMLAH PENDAPATAN															
				5				BELANJA															
1								BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGORI															
1	1							SUB BIDANG															
1	1	01						KEGIATAN															
1	1	02						Dst.....															
2								BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGORI															
2	1							SUB BIDANG															
2	1	01						KEGIATAN															
2	1	02						Dst.....															

Rekening						Uraian	Uraian Keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran		Realisasi	Sisa		% Capaian Keluaran	Tenaga Kerja Orang	Durasi Hari	Upah		Ket
1					Rp.					Rp.	Rp.		Rp.	(8)-(6-7)				Rp.	(12)	
a	b	c	a	b																
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)		
						BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGORI														
						SUB BIDANG														
						KEGIATAN														
						Dst.....														
						BIDANG														
						PEMBERDAYAAN														
						MASYARAKAT														
						NAGORI														
						SUB BIDANG														
						KEGIATAN														
						Dst.....														
						BIDANG														
						PENANGGULANGAN														
						BENCANA, KEADAAN														
						DARURAT DAN														
						MENDESAK NAGORI														
						SUB BIDANG														
						PENANGGULANGAN														
						BENCANA														
						PENANGGULANGAN														
						BENCANA														
						Belanja Tak Terduga														
						PEMBIAYAAN														
						Pengeluaran														
						Pembiayaan														
						Penyertaan Modal														
						Nagori														

C. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN SISA ATAS PEMBAGIAN ADN, DBH DAN BHPRD

PERMOHONAN PENCAIRAN SISA ATAS PEMBAGIAN ADN, DBH DAN BHPRD
SETELAH DIKURANG SILTAP DAN TUNJANGAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN
TAHAP (...%) TAHUN ANGGARAN 20....
Nomor :

NAGORI :

KECAMATAN :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun 20...,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Jabatan : Pangulu

2. Nama :

Jabatan : Kaur Keuangan Nagori

Dengan ini bersama-sama melakukan persiapan bahwa:

1. Pelaksanaan ADN, DBH dan BHPRD untuk Nagori
Kecamatan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 20....

2. Telah ditetapkan APBNag dan telah terpenuhinya persyaratan teknis dan administrasi maka, kami mengajukan pencairan Sisa Atas Pembagian ADN, DBH dan BHPRD setelah dikurang Siltap dan Tunjangan selama 1 (satu) Tahun, adalah sebesar Tahap (...%)
dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori
- Rp -

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori
- Rp -

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Rp -

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Rp -

Jumlah : Rp -

Untuk pembiayaan APBNag maka Pangulu dan Sekretaris Nagori harus bertanggung jawab sepenuhnya.
Demikian Permohonan Pencairan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANGULU

KAUR KEUANGAN
NAGORI

Materai
10.000

.....

BUPATI SIMALUNGUN,
ttd.

RADIAPOH HASIROLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 19 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN,

AKMAL HARIF SIREGAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025 NOMOR 691.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara